

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang akan dilakukan, Penulis memilih tiga penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dipilih, yang juga dapat dijadikan referensi dan sumber rujukan penelitian. Yang pertama adalah Jurnal yang berjudul “Dampak Perubahan Iklim di Pasifik Selatan: Ancaman Naiknya Permukaan Air Laut Terhadap Eksistensi Negara dan Penduduk Kiribati”, karya Melpayanty Sinaga dan Yusril tahun 2021.

Penelitian oleh Melpayanty dan Yusril ini menghasilkan sebuah penjelasan baru tentang resiko tenggelamnya Kepulauan Pasifik Selatan, sebab daerah ini dianggap daerah dengan dataran yang rendah. Dengan fokus mengkaji ancaman yang ada di Kiribati beserta upaya pemerintah setempat, kedua peneliti memaparkan bahwa hilangnya pulau-pulau di kawasan Pasifik Selatan tidak hanya mengancam kehidupan penduduk Kiribati, tetapi juga mengancam punahnya flora dan fauna yang ada disana. Sehingga, dalam penelitian ditemukan bahwa pemerintah Kiribati telah berupaya dalam usaha menghadapi dan menyesuaikan diri dengan perubahan iklim global dengan cara adaptasi, mitigasi, dan relokasi.¹⁹

Dengan adanya hasil penelitian dari jurnal tersebut, maka muncul sebuah perbedaan antara penelitian terdahulu dan terkini, yang mana penelitian terdahulu oleh Melpayanty Sinaga dan Yusril membahas tentang bagaimana pemerintah Kiribati berupaya menghadapi dan menyesuaikan diri dengan perubahan iklim global. Pemilihan jurnal didasarkan pada gagasan proses adaptasi, mitigasi, dan relokasi di Kiribati, yang kemudian menimbulkan sejumlah pertanyaan oleh penulis seperti apakah hal tersebut terjadi dan di refleksikan di negara pulau kecil kawasan Pasifik lainnya atau tidak. Sehingga, melalui pertanyaan tersebut, muncullah

¹⁹ Sinaga, Melpayanty & Yusril. 2021. *Dampak Perubahan Iklim di Pasifik Selatan: Ancaman Naiknya Permukaan Air Laut Terhadap Eksistensi Negara dan Penduduk Kiribati*. Papua Journal of Diplomacy and International Relations, Volume 1, Issue 1, May 2021 (29-43). Hlm 31.

gagasan untuk menganalisis proses negara kecil dalam menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan iklim.

Sementara penelitian terkini menyoroti peran AOSIS sebagai regionalisme dalam membantu negara anggotanya di kawasan Pasifik dalam menghadapi dan mengatasi perubahan iklim global yang dikhususkan di negara pulau kecil kawasan Pasifik. Dalam mengadakan penelitian terkait peran AOSIS pun, penulis menemukan bahwa AOSIS belum menjalankan perannya dengan maksimal sebab belum ditemukan adanya unsur praktis atau kegiatan nyata yang diterapkan AOSIS di kawasan Pasifik terhadap perubahan iklim.

Penelitian terdahulu sebagai sumber referensi berikutnya adalah karya Cecelia Bolon yang berjudul “1.5 to Stay Alive: The Influence of AOSIS in International Climate Negotiations” pada tahun 2018. Dalam penelitian terkait target menurunkan 1,5 derajat dengan fokus pembahasan AOSIS dan negara anggotanya, penelitian ini menyimpulkan bahwa kekuatan untuk menghadapi perubahan iklim global hanya dapat dicapai dengan pendanaan untuk pembangunan berkelanjutan, proses adaptasi, dan partisipasi yang berarti dalam negosiasi iklim. Negara-negara AOSIS memiliki pengaruh besar pada negosiasi iklim, mitigasi iklim saat ini dan upaya adaptasi tidak cukup untuk memastikan kelangsungan hidup jangka panjang negara-negara ini.²⁰

Penulis jurnal ini juga memaparkan bahwa AOSIS juga sudah berkontribusi dalam perjanjian iklim internasional dan seharusnya negara maju seperti AS yang dibutuhkan lebih banyak memanfaatkan teknologi dan kekayaan mereka untuk kebaikan lingkungan. Penelitian ini berfokus dalam membahas pencapaian menurunkan 1,5° Celcius suhu bumi, dan banyak mengkritisi negara maju yang masih mengandalkan energy batu bara hingga penggunaan mesin yang menghasilkan panas yang tinggi.

Penggunaan jurnal ini sebagai referensi penelitian terdahulu, didasarkan pada adanya upaya AOSIS yang memfokuskan pembahasan pada efisiensi kekuatan

²⁰ Bolon, Cecelia. 2018. *1.5 to Stay Alive: The Influence of AOSIS in International Climate Negotiations*. E-International Relations Journal. Dokumen dapat diakses dalam <https://www.e-ir.info/2018/11/17/1-5-to-stay-alive-the-influence-of-aosis-in-international-climate-negotiations/>

pendanaan untuk pembangunan pasca kerusakan lingkungan itu sendiri. Dengan demikian, hasil temuan berupa pendanaan iklim dapat dijadikan referensi bagi upaya AOSIS itu sendiri dalam memperjuangkan pendanaan iklim untuk negara pulau kecil kawasan Pasifik.

Sementara itu, untuk mendukung kemajuan nilai akademisi dan perkembangan ilmu tentang perubahan iklim, penelitian terkini akan difokuskan pada peran AOSIS dalam konferensi internasional, dan bagaimana peran AOSIS dalam membantu negara anggotanya beradaptasi dalam perubahan iklim, sebagaimana kasus yang akan dibahas merupakan kenaikan permukaan air laut. Dalam hal ini, membahas juga upaya AOSIS yang mewakilkan negara anggotanya dalam forum internasional di rentang 2017-2021, serta upaya praktis yang dilakukan oleh AOSIS untuk membantu negara pulau kecil di kawasan pasifik menghadapi kenaikan permukaan air laut. Peran negara maju yang merugikan dan disebutkan dalam penelitian terdahulu hanya akan dijadikan referensi pendukung sebagai sumber data bahwa penyebab kenaikan permukaan air laut bersumber dari suhu bumi yang meningkat.

Penelitian terdahulu yang relevan selanjutnya adalah karya Soedjajadi Keman tahun 2007, dengan judul “Perubahan Iklim Global, Kesehatan Manusia, dan Pembangunan Berkelanjutan”. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait hubungan antara perubahan iklim global, kesehatan manusia dan pembangunan berkelanjutan adalah perubahan iklim global dapat membawa suatu dampak pada kesehatan misalnya munculnya kompleksivitas suatu penyakit.

Adanya perubahan suhu yang ekstrim dan perubahan curah hujan yang merupakan indikasi dari adanya perubahan iklim diterangkan mampu menyebabkan penyebaran penyakit yang lebih cepat, yang mana adanya penyebaran penyakit ini memicu tingginya angka kematian suatu negara. Sementara itu, kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan yakni perubahan iklim dan efeknya terhadap masalah kesehatan manusia, menjadi urgensi dan tantangan pembangunan nasional, sebab umumnya negara negara yang lebih parah terdampak perubahan iklim adalah negara berkembang dan negara kecil dengan tidak menganut sistem industry atau sistem pertanian yang intensif.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dijabarkan adalah penelitian terdahulu cenderung membahas tentang kaitan antara perubahan iklim, kesehatan manusia, dan pembangunan berkelanjutan. Dalam hasil penelitian juga disebutkan bahwa negara berkembang menjadi negara yang paling terdampak perubahan iklim, tetapi dalam penelitian ini tidak disebutkan dan dijelaskan bahwa SIDS lebih terdampak dan beresiko atas perubahan iklim khususnya kenaikan permukaan air laut.

Jurnal ini digunakan sebagai penelitian relevan sebab mengkaji tentang keamanan manusia, yang mana keamanan manusia menjadi poin yang dibahas dalam penelitian kali ini. Jurnal tersebut juga membahas poin yang salah satunya adalah kaitan antara keamanan manusia dengan perubahan iklim, yang mana hal ini merupakan sumber referensi yang dibutuhkan untuk menunjang proses analisis data penelitian.

Sementara itu, penelitian terkini akan membahas tentang resiko dari perubahan iklim yang begitu berdampak pada pulau kecil khususnya di kawasan Pasifik. Penelitian ini turut memaparkan adanya perubahan tidak signifikan pada permukaan air laut yang mengancam kehidupan masyarakat pesisir Pasifik. Kemudian, penelitian akan membahas lebih dalam bagaimana peran AOSIS dalam membantu negara anggotanya mengatasi kenaikan permukaan air laut, akan turut melindungi keamanan manusia khususnya di SIDS kawasan Pasifik.

2.2 Kerangka Teori dan Konsep

2.2.1 Neoliberal-Institusionalisme

Dalam buku *Power and Independence*, Robert Keohane dan Joseph Nye menguraikan bagaimana lembaga internasional membentuk respon penting terhadap kondisi saling ketergantungan yang kompleks.²¹ Neoliberal-institusionalisme pertamakali dicetuskan pada tahun 1970an oleh Robert Keohane, Joseph Nye, Robert Axelrod, Ronald Coase, Volker

²¹ Keohane, Robert. O; Nye, Joseph S. 1977. *Power and Interdependence: World Politics in Transitions*. Boston: Little Brown. hlm: 47.

Rittberger, dan lain-lain.²² Teori ini menjelaskan tentang hubungan saling ketergantungan antarnegara dari adanya organisasi internasional yang terbentuk. Fungsi dari organisasi internasional ini sendiri dipercaya berguna untuk mewadahi negara-negara anggotanya dalam menghadapi berbagai masalah secara bersama. Oleh sebab itu, adanya institusi internasional penting untuk mewadahi negara dalam melakukan kerjasama dan mengatasi berbagai permasalahan yang bersifat kolektif.²³

Pengadaan organisasi internasional sebagai wadah penyelesaian masalah secara bersama-sama antarnegara, didefinisikan oleh para ahli sebagai kontrak sosial yang diadakan oleh masyarakat dengan negara. Menurut para ahli, demi kepentingan mereka sendiri, negara dengan sukarela menyerahkan sebagian kebebasan mereka sebagai suatu negara, dengan bergabung ke dalam suatu organisasi internasional untuk mencapai suatu hasil yang lebih baik secara bersama dalam wadah organisasi internasional.²⁴ Organisasi internasional tentunya dalam upaya mencapai misi, turut membentuk regionalisme yang menangani wilayah atau kasus di bidang tertentu, sehingga pencapaian tujuan dapat lebih terarah.

Dalam perkembangannya, kepentingan bersama sebagai salah satu fokus dalam neoliberalisme telah meluas melebihi perdagangan dan isu-isu pembangunan, melainkan juga dalam mengatasi ancaman keamanan baru, seperti ancaman terorisme, proliferasi senjata pemusnah masal, konflik internal yang mengancam stabilitas kawasan dan global, dan bahkan isu-isu lingkungan hidup.²⁵

²² Hohenstedt, Maximilian. 2017. The usefulness of Neoliberal Institutionalism. Establishment of international organizations. Diakses dalam <https://www.grin.com/document/385718> pada 12 November 2021 pukul 14:34 WIB.

²³ *Op. cit.* hlm: 48.

²⁴ Stein, Arthur A. 2008. Neoliberal Institutionalism. In *The Oxford Handbook on International Relations*, pp. 201–221. New York: Oxford University Press. Diakses dalam <https://www.grandstrategy.net/Articles-pdf/11-Smit-Snidal-c11.pdf> pada 12 November 2021 pukul 14:12 WIB. hlm: 209.

²⁵ Lamy. 2014. Dalam Hasanah, Liana; Puspitasari, Viani. 2019. *Kerja Sama Indonesia – Jepang dalam Joint Credit Mechanism (JCM) pada Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia*. Padjajaran Journal of International Relations. e-ISSN: 2684-8082 Vol. 1 No. 2, Agustus 2019 (142-155) doi: 10.24198/padjir.v1i2.26131. hlm: 144-145.

Berdasarkan ketentuan pembentukan organisasi regional dalam suatu kawasan, AOSIS sebagaimana yang menjadi fokus penelitian, termasuk kedalam pembentukan regionalisme yakni *neofunctionalist approach* atau pendekatan neofungsionalis. Pendekatan neofungsionalis awalnya menganggap bahwa dewasa ini terdapat berbagai macam permasalahan yang berkembang diantara negara-negara di dunia yang tidak dapat lagi diselesaikan oleh satu negara saja, sehingga teori ini mengusulkan perlunya ada organisasi yang menghimpun negara-negara untuk menyelesaikan permasalahan itu secara bersama-sama.²⁶ Dengan demikian, meskipun hubungan internasional antarnegara di dunia dinilai anarki, namun neoliberal-institusionalisme melihat bahwa keberadaan negara-negara justru saling ketergantungan dan saling membutuhkan.

Dalam kaitannya dengan topic pembahasan tentang upaya AOSIS, keberadaan AOSIS sebagai regionalisme berfungsi sebagai sarana penyelesaian masalah yang dihadapi oleh negara anggota. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan dalam neoliberal-institusionalisme, yang mana mengemukakan fungsi organisasi internasional sebagai wadah penyelesaian masalah secara bersama-sama antarnegara. Keberadaan AOSIS yang mewakili anggotanya untuk dapat menyuarakan urgensi perubahan iklim di forum internasional, serta membantu proses adaptasi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan dibahas dalam penelitian ini merupakan refleksi dari neoliberal-institusionalisme.

Penggunaan teori neoliberal-institusionalisme dalam penelitian, ditujukan untuk membahas upaya dan efisiensi AOSIS sebagai regionalisme dalam membantu negara pulau kecil menghadapi kenaikan permukaan air laut. Melalui hasil penelitian dan data yang dikumpulkan, teori ini akan di elaborasi berdasarkan upaya yang dilakukan oleh AOSIS, baik dalam forum internasional maupun upaya praktis.

²⁶ Mulyana, Imam; Handayani, Irawati. 2015. *Peran Organisasi Regional Dalam Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional*. Jurnal Cita Hukum Vol.3 No.2, pp.247-268, DOI:10.15408/jch.v2i2.2317.2015.3.2.247-268 . Jakarta: FSH UIN Syarif Hidayatullah. hlm: 253.

2.2.2 *Green Political Theory*

Dalam perkembangannya, *green political theory* memiliki pembagian kedalam empat gelombang. Gelombang pertama berkaitan dengan kekhasan ekologis atau hubungan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya sebagai pendekatan khas untuk politik. Gelombang kedua ditandai dengan adanya perdebatan diantara *green political theory* dengan teori lain seperti liberalism, feminisme, dan sosialisme, yang umumnya berkonsep demokrasi, keadilan, negara, dan kewarganegaraan. Gelombang ketiga dari perkembangan *green political theory*, ditandai dengan lebih banyaknya ilmu atau konsep yang terlibat dalam praktik maupun penelitian empiris dari *green political theory*.

Perspektif Eurosentris dari analisis Inglehart, gelombang ketiga *green political theory* dibatasi dengan adanya perolehan kekayaan dengan pembatasan dalam fokus lingkungan, baik pencemaran maupun partisipasi dalam rangka kepedulian lingkungan.²⁷ Sedangkan gelombang keempat banyak membahas dan menghubungkan hubungan antara manusia dengan lingkungan. Perbedaan yang cukup khas antara gelombang ketiga dan keempat adalah gelombang tiga berfokus pada fenomena kapitalisme dan lingkungan, sedangkan gelombang keempat banyak menjelaskan tentang meninggalkan generasi penerus yang dapat berperan dalam melestarikan lingkungan sekitar.

Seiring maraknya perkembangan industri dan kapitalisme di berbagai negara, aktivitas manusia ini juga turut menyumbang kerusakan lingkungan, termasuk memicu adanya perubahan iklim global. Sebagaimana yang telah dijelaskan, perubahan iklim tidak hanya terjadi secara alami dan disebabkan oleh alam, tetapi juga adanya aktivitas manusia yang mendorong cepat terjadinya perubahan-perubahan ekstrim, yang salah satunya adalah perubahan suhu dan curah hujan. Dalam menghadapi fenomena lingkungan yang ada dewasa ini, *green political theory* dapat

²⁷ Barry, John. 2014. *Green Political Theory* dalam *Political Ideologies: An Introduction*. London: Routledge. hlm: 153-178.

menjadi teori yang tepat untuk menganalisis permasalahan dan juga cara mengatasi dengan efektif.

Kajian dasar dari *green political theory* atau politik hijau adalah mengaitkan aktivitas ekonomi dengan krisis lingkungan yang ada. Menurut Dobson, terdapat dua karakteristik dari *green political theory*, yang mana *green political theory* menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang bersifat eksponen yang berlangsung sepanjang dua abad terakhir merupakan penyebab utama krisis lingkungan yang ada sekarang ini.²⁸ Karakteristik kedua dijelaskan oleh Eckersley yakni ekosentrisme. Ekosentrisme merupakan sebuah penolakan terhadap pandangan dunia antroposentris yang hanya menempatkan nilai moral atas manusia menuju sebuah pandangan yang juga menempatkan nilai independen atas ekosistem dan semua makhluk hidup.²⁹

Dalam *green political theory* juga dijelaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi memiliki sejarah dan proses dan bukanlah sesuatu yang dapat di rekayasa manusia, meski manusia memiliki peran dalam fenomena tersebut seperti adanya kegiatan yang memicu suhu bumi menjadi semakin panas, dan mengakibatkan peristiwa perubahan iklim. Isu lingkungan yang kian mengancam membutuhkan respon serius dari pemerintah, organisasi pemerintah, maupun organisasi non-pemerintah.³⁰ Kegunaan *green political theory* dalam berusaha menganalisis dan memahami fenomena perubahan iklim adalah terletak pada bagaimana umat manusia memahami nilai ekologis jangka panjang dari adanya ketergantungan umat manusia dewasa ini terhadap bahan bakar fosil.

Kepentingan dunia ekonomi yang semakin marak akan kapitalisme yang membuat lingkungan semakin rusak, *green political theory* membantu untuk mengadakan suatu perubahan nilai dan perilaku manusia untuk

²⁸ Burchill, Scott; Linklater, Andrew. 2015. *Teori-Teori Hubungan Internasional, Bab 9: Politik Hijau*. Bandung: Nusa Media. hlm: 338.

²⁹ Eckersley. 1992. Dalam Burchill, Scott; Linklater, Andrew. 2015. *Teori-Teori Hubungan Internasional, Bab 9: Politik Hijau*. Bandung: Nusa Media. hlm: 338.

³⁰ Barry, John. 2014. *Green Political Theory dalam Political Ideologies: An Introduction*. London: Routledge. hlm: 153-178.

memberikan peluang untuk inovasi politik dan bahkan perubahan transformatif dalam politik global.³¹ Oleh karena itu, *green political theory* dapat membantu manusia mendefinisikan kembali isu-isu perubahan iklim dan dapat berupaya mengubah ataupun menyesuaikan kebiasaan dalam jangka panjang.

Pemanasan global sendiri terjadi tentu akibat adanya peran dari manusia didalamnya, seperti kegiatan industry, maupun penggunaan bahan bakar tidak ramah lingkungan lainnya. Dengan demikian, dari proses dan fenomena alam ini yang terjadi sebab adanya peran manusia didalamnya, maka AOSIS didirikan untuk mengubah dan membantu mengatasi hal tersebut, dengan memainkan perannya dalam forum internasional yakni menyuarakan urgensi perubahan iklim, dan mengecam negara-negara maju untuk segera menghentikan pemakaian bahan bakar yang tidak ramah lingkungan.

Green political theory merupakan teori yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini dikarenakan *green political theory* mengkaji ilmu tentang lingkungan yang memiliki sejarah sebelum pada akhirnya rusak. Tidak hanya sejarah, *green political theory* turut berpartisipasi untuk menyadarkan umat manusia tentang bahaya yang mungkin ditimbulkan dari setiap kegiatan yang ada, serta mendemokan untuk menghentikan kegiatan tersebut, yang mana hal ini seiras dengan diadakannya penelitian ini.

Penggunaan teori *green political theory* dalam topik perubahan iklim kali ini ditujukan untuk menganalisis dampak yang dirasakan oleh negara pulau kecil seperti berkurangnya lahan untuk tempat tinggal, hilangnya mata air sebagai sumber air bersih, dan berkurangnya keanekaragaman hayati laut yang menyebabkan hilangnya mata pencaharian masyarakat pesisir. Sejumlah dampak yang dirasakan oleh negara pulau kecil tentu memiliki sebab dan sejarah terdahulu yang

³¹ Dyer, Hugh. 2018. *Introducing Green Theory in International Relations*. ISSN 2053-8626. Diakses dalam <https://www.e-ir.info/pdf/72249> pada 12 November 2021 pukul 13:51 WIB. hlm: 3.

membuat kenaikan permukaan air laut semakin mengancam masyarakat pesisir.

Dengan hal tersebut, pada bagian pembahasan penulis menyertakan analisis terkait perubahan kenaikan permukaan air laut di Pasifik dalam kurun waktu tertentu dan membandingkannya dengan kondisi saat ini. Proyeksi dan gambaran dari adanya perubahan permukaan air laut dari masa ke masa, akan membantu menyadarkan umat manusia untuk mengurangi hingga menghentikan keberlangsungan kegiatan yang dapat menjadi pemicu perubahan iklim.

2.2.3 *Human Security*

Konsep *human security* atau keamanan manusia, berangkat dari adanya konsep *national security*, yang mana pada masa Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Perang Dingin, aktor utama dalam interaksi internasional adalah negara, yang mana mengantarkan konsep *national security* kepada fokus dalam bidang militer. Konsep *national security* kemudian bertransformasi menjadi *human security* yang menekankan pada keamanan individu dan bukan lagi negara, segera setelah diangkatnya “*human security*” tersebut dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada tahun 1948. Namun, konsep ini terkesan sia-sia sebab pecahnya Perang Dunia Kedua dinilai tidak mencerminkan adanya konsep *human security* tersebut, dan bahkan konsep *national security* lebih banyak dipakai sebab Perang Dingin memicu tiap negara untuk mengadakan blok-blok tertentu yang mana ini membawa konsep negara kembali *happening* pada saat itu.

Namun, dalam era kontemporer yakni pasca Perang Dingin, konsep *human security* kembali menjadi perbincangan dan urgensi dunia. Hal ini didukung dengan adanya keinginan PBB atas desakan negara-negara dunia

ketiga agar PBB lebih berperan aktif dalam mengantisipasi perkembangan isu-isu global kontemporer pasca Perang Dingin.³²

Konsep *human security* tentunya tidak lagi membahas tentang ancaman keamanan yang bersifat militeristik yang mengancam kedaulatan negara secara luas, tetapi banyak membahas tentang ancaman-ancaman yang mungkin ada dan mengancam keselamatan tiap individu. Sebagaimana dunia dan politik internasional mengalami transformasi cara pandang mengenai suatu peristiwa pasca Perang Dingin, konsep *human security* juga menekankan pada masalah kontemporer seperti kerjasama perdagangan regional, hak asasi, pendidikan, hingga pewarisan budaya.

Tidak hanya dalam ekonomi dan sosial, konsep *human security* juga banyak digunakan untuk meneliti kajian permasalahan lingkungan yang dapat mengancam kehidupan dan keamanan umat manusia. Di bidang lingkungan hidup, perhatian ditujukan kepada isu pemanasan global, pencemaran lingkungan, keberlangsungan satwa-satwa liar serta endemik, sampai pada keberagaman flora dan fauna dalam ekosistem.³³

Dalam konsep *human security*, terdapat 7 kajian yang dibahas dalam konsep *human security* sebagaimana yang tercatat dalam laporan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) tahun 1994, antara lain:

- a. Keamanan Ekonomi (*Economic Security*), mengacu pada kenikmatan individu atas pendapatan dasar/*basic income*, baik melalui pekerjaan yang menguntungkan atau dari jaring pengaman sosial;
- b. Keamanan Pangan (*Food Security*), mengacu pada akses individu terhadap makanan melalui aset, pekerjaan, atau penghasilan yang dimilikinya;

³² Nasution, Khairiah. 2014. *Human Security dalam Perspektif Keamanan Nasional, regional, dan Global*. Dokumen yang diakses dalam https://www.academia.edu/9937471/_Human_Security_dalam_Perspektif_Keamanan_Nasional_Regional_dan_Global_ pada 11 November 2021 pukul 15:23 WIB. hlm: 8.

³³ Sudiar, S. 2018. *Pendekatan Keamanan Manusia dalam Studi Perbatasan Negara*. Jurnal Hubungan Internasional, 7(2). <https://doi.org/10.18196/hi.72139> . hlm: 2.

- c. Keamanan Kesehatan (*Health Security*), mengacu pada kebebasan individu dari berbagai penyakit dan melemahkan penyakit, dan aksesnya kepada perawatan kesehatan;
- d. Keamanan Lingkungan (*Environmental Security*), mengacu pada integritas tanah, udara, dan air, yang membuat manusia betah untuk tinggal;
- e. Keamanan Pribadi (*Personal Security*), mengacu pada kebebasan individu dari kejahatan dan kekerasan, khususnya perempuan dan anak-anak;
- f. Keamanan Komunitas (*Community Security*), mengacu pada martabat budaya dan perdamaian antar-komunitas dimana individu hidup dan tumbuh;
- g. Keamanan Politik (*Political Security*), mengacu pada perlindungan terhadap pelanggaran HAM.³⁴

Pemaparan tentang konsep *human security* tersebut, menunjukkan bahwa isu lingkungan dan perubahan iklim, termasuk juga ke dalam urgensi isu era kontemporer yang merupakan bagian dari bidang yang menjadi fokus kajian *human security*. Hal ini dikarenakan, jika adanya lingkungan yang rusak akibat adanya perubahan iklim global, maka manusia akan semakin kesulitan untuk memperoleh tempat tinggal yang layak, juga kesulitan dalam memperoleh sumber daya. Dari adanya kesulitan dalam memperoleh hal tersebut lah muncul adanya ancaman penyakit yang dapat mendorong tingginya angka kematian global.

Konsep *human security* menjadi konsep yang tepat untuk membantu proses analisa penelitian sebab *human security* memiliki kajian keamanan pangan dan lingkungan. Kaitannya adalah, kedua kajian *human security* tersebut merupakan sumber permasalahan yang ada di kawasan Pasifik, sebab dengan adanya kenaikan permukaan air laut yang semakin bertambah setiap tahunnya, hal tersebut semakin mengikis daratan, menutup sumber

³⁴ Ruhiyat, Erwin. *Pengantar Kajian Human Security*. Dokumen yang diakses dalam <https://www.scribd.com/doc/114988976/Pengantar-Human-Security> pada 11 November 2021 pukul 15:49 WIB. hlm: 11-12.

mata air bersih, hingga hilangnya keanekaragaman flora dan fauna yang menyebabkan nelayan tidak memiliki keragaman hasil laut, dan berpotensi kehilangan mata pencaharian.

Konsep *human security* ditujukan untuk menganalisis fenomena dan ancaman yang muncul dari adanya perubahan iklim global, khususnya di kawasan Pasifik, dan bagaimana hal tersebut mengancam keselamatan manusia. Melalui kajian keamanan pangan dan keamanan lingkungan, konsep *human security* akan digunakan untuk menganalisis ancaman dari adanya kenaikan permukaan air laut yang terus bertambah setiap tahunnya.

2.2.4 *National Interest*

National interest atau kepentingan nasional memiliki kaitan erat dengan power dan tujuan negara. Dalam studi Hubungan Internasional, konsep kepentingan nasional menjadi konsep yang utama sebagai peninjau interaksi antarnegara. Hans J. Morgenthau mengemukakan konsep kepentingan nasional pertama kali dalam esai "*The Primacy of the National Interest*" sebagai bagian dari sebuah forum dalam edisi Musim Semi 1949 dari *The American Scholar* berjudul "Kepentingan Nasional dan Prinsip Moral dalam Kebijakan Luar Negeri."³⁵

Sementara itu, Morgenthau juga turut menjelaskan konsep kepentingan nasional dalam beberapa poin, diantaranya:

- a. Kepentingan nasional sebagai perlindungan terhadap identitas fisik, dalam arti mampu mempertahankan teritorialnya;
- b. Kepentingan nasional sebagai perlindungan terhadap identitas politik;
- c. Kepentingan nasional sebagai perlindungan terhadap kultur dan budaya.³⁶

³⁵ Suwarman, Eufronius Marianus; dkk. 2018. *Rivalitas Geopolitik Amerika Serikat – Tiongkok di Myanmar*. Jurnal Asia Pacific Studies Vol.2 No.2 / July- December 2018 pp 180-191 <https://dx.doi.org/10.33541/japs.v3i1.1071> Universitas Kristen Indonesia Hlm: 182.

³⁶ Yani, Yanyan Mochammad; dkk. 2017. *Pengantar Studi Keamanan*. Malang: Intrans Publishing.

Dengan demikian sebagaimana penjelasan Morgenthau mengenai konsep kepentingan nasional, dapat disimpulkan bahwa kepentingan nasional merupakan sesuatu yang menguntungkan bangsa.

Dalam kaitannya dengan topic pembahasan mengenai upaya AOSIS di kawasan Pasifik, kepentingan nasional dari tiap negara terlihat dari bergabungnya negara-negara pulau kecil kawasan Pasifik untuk mengurangi resiko yang mungkin ditimbulkan dari naiknya permukaan air laut sebagai dampak dari adanya pemanasan global. Dengan bergabung kedalam AOSIS, tiap negara mempercayai pencapaian kepentingan nasional untuk mengamankan bangsanya dari adanya ancaman kenaikan permukaan air laut.

Penggunaan konsep kepentingan nasional dalam penelitian ini, terletak pada proses analisis keinginan tiap negara untuk melindungi keamanan masyarakatnya dengan bergabung dalam suatu organisasi internasional, khusus untuk membantu menghadapi dan menangani kerusakan lingkungan negara anggotanya. Melalui AOSIS, tiap negara kecil di kawasan Pasifik menaruh kepercayaan pada AOSIS sebagai regionalism untuk mencapai kepentingan nasional yang menyuarakan krisis perubahan iklim beserta ancamannya di forum internasional dan dalam upaya praktis.